

## POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN



Gambar 7. 1 Kantor DPRD Kabupaten Sumbawa

### 7.1. Lembaga Legislatif

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota serta mengacu pada Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2020 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa bahwa DPRD memiliki fungsi Legislasi, fungsi Anggaran dan fungsi Pengawasan.

1. Fungsi Legislasi, diwujudkan dalam bentuk penyusunan Peraturan Daerah bersama Kepala Daerah, dapat berupa usulan eksekutif ataupun legislatif berupa rancangan Peraturan Daerah yang bersifat inisiatif;
2. Fungsi Anggaran, adalah fungsi DPRD bersama Pemerintah Daerah untuk menyusun dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang didalamnya termasuk melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang DPRD ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang mencerminkan program dan kegiatan tahunan Pemerintah Daerah;

3. Fungsi Pengawasan, dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah, perencanaan dan pelaksanaan APBD.

Ketiga fungsi tersebut dilaksanakan dalam rangka representasi rakyat di daerah. Sebagai representasi dari masyarakat, dalam hal penyusunan kebijakan anggaran pendapatan dan belanja daerah lembaga DPRD berusaha semaksimal mungkin agar:

1. Semua belanja daerah harus bermanfaat bagi masyarakat;
2. Kebijakan anggaran harus disusun secara transparan dan akuntabel di mana informasi dapat diakses oleh masyarakat;
3. Upaya meningkatkan pendapatan asli daerah tidak membebani masyarakat;
4. Terdapat perimbangan antara belanja berorientasi pada aparatur dan belanja berorientasi masyarakat.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa yang beranggotakan 45 orang, terdiri dari 39 laki-laki dan 6 wanita, dengan komposisi anggota dewan yang terbagi dalam 4 Komisi dan 12 Fraksi yang berasal dari berbagai partai politik berdasarkan pemenuhan jumlah suara yang dipersyaratkan.

**Tabel 7. 1 Jumlah Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa**

No	Partai Politik	Laki-laki	Perempuan	Jumlah Anggota
1	Partai PDI-Perjuangan	4	2	6
2	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	5	-	5
3	Partai Demokrat	4	1	5
4	Partai Golongan Karya (Golkar)	4	-	4
5	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	4	-	4
6	Partai Amanat Nasional (PAN)	3	1	4
7	Partai Nasdem	3	1	4
8	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	4	-	4

No	Partai Politik	Laki-laki	Perempuan	Jumlah Anggota
9	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	3	1	4
10	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	3	-	3
11	Partai Berkarya	1	-	1
12	PKPI	1	-	1
<b>Total</b>		<b>39</b>	<b>6</b>	<b>45</b>

Sumber Data: KPUD Kabupaten Sumbawa

Hasil pemilu legislatif 2019, telah mengubah peta politik di Kabupaten Sumbawa. Hal ini ditunjukkan oleh adanya perubahan jumlah anggota DPRD Kabupaten Sumbawa menurut Partai Politik. Pemilu legislatif 2019 telah menghasilkan 45 anggota DPRD Kabupaten Sumbawa. Terjadi bias gender dalam komposisi keanggotaan DPRD Kabupaten Sumbawa. Hal ini ditunjukkan oleh cukup sedikitnya keterwakilan kaum perempuan yang duduk sebagai anggota DPRD. Keterwakilan kaum perempuan di parlemen hanya sebesar 13,33 persen dari keseluruhan anggota DPRD Kabupaten Sumbawa. Dalam hal ini partai politik perlu melakukan pengkaderan dengan matang kepada caleg perempuan agar dapat meningkatkan persentase perempuan untuk dapat duduk kursi DPRD. Pada Tahun 2023, jumlah anggota DPRD tetap dari tahun sebelumnya yaitu 45 orang.



Gambar 7. 2 Jumlah Sidang yang dilaksanakan DPRD Tingkat II Kabupaten Sumbawa Tahun 2023  
Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Sumbawa

Salah satu ukuran kinerja dari DPRD adalah jumlah produk yang dihasilkan seperti Peraturan Daerah (Perda) dan Keputusan DPRD. Sidang yang diadakan oleh DPRD selama Tahun 2023 yaitu sebanyak 155 kali, yang didominasi oleh sidang komisi-komisi sebanyak 59 kali. Dari sidang atau rapat yang diadakan tersebut dihasilkan 9 Peraturan Daerah, 23 Keputusan DPRD dan 5 Keputusan Pimpinan. Jumlah produk yang dihasilkan pada Tahun 2023 mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan sidang yang diadakan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

**Tabel 7. 2 Produk-Produk DPRD dan Kepala Daerah Kabupaten Sumbawa  
Tahun 2019-2023**

No.	Tahun	Peraturan Daerah	Keputusan		Total Peraturan dan Keputusan
			DPRD	Pimpinan	
1.	2019	10	23	2	35
2.	2020	5	11	8	23
3.	2021	12	15	7	34
4.	2022	12	19	2	33
5.	2023	9	23	5	37

Sumber Data: Sekretariat DPRD Kabupaten Sumbawa

## 7.2. Ketentraman dan Ketertiban Umum

Penegakan Hukum, Ketentraman dan Ketertiban merupakan hal utama untuk dilaksanakan, sehingga gangguan-gangguan yang disebabkan oleh konflik berbasis SARA, anarkisme bahkan separatisme tidak terjadi di Wilayah Kabupaten Sumbawa. Kondisi yang kondusif ini dapat terjaga karena adanya koordinasi dan jalinan komunikasi/kerjasama dengan aparat keamanan seperti Kepolisian Resort Sumbawa, Komando Distrik Militer (KODIM) Kabupaten Sumbawa dan jajaran terkait lainnya serta daya dukung masyarakat dalam menciptakan rasa aman dan nyaman. Adapun upaya-upaya yang rutin dilaksanakan setiap tahun, antara lain:

- Koordinasi dengan aparat pengamanan terkait dalam rangka koordinasi Pembina wilayah yang dilaksanakan setiap bulan yang terdiri dari anggota Forum Koordinasi Pimpinan Umat Beragama;
- Penyiapan SDM yang memiliki kapasitas yang memadai melalui pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan;
- Membangun forum-forum diskusi;
- Melakukan tindakan sesuai aturan/regulasi dalam rangka supremasi hukum secara tegas dan konsisten;
- Penyuluhan, pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba;
- Melakukan fasilitasi pembinaan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum bagi lembaga kemasyarakatan, tokoh masyarakat, tokoh agama, aparat keamanan di tingkat kecamatan dan kelurahan;
- Melaksanakan fasilitasi kegiatan monitoring wilayah sebagai langkah antisipatif terhadap gangguan ketentraman dan ketertiban yang mungkin bisa terjadi;
- Melaksanakan aktifitas patroli wilayah untuk menciptakan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat.



## Banyaknya Tindak Pidana Kejahatan yang Telah Diputuskan Pengadilan Negeri Sumbawa Tahun 2023

**Tabel 7. 3 Tindak Pidana Kejahatan yang Telah Diputuskan di Kabupaten Sumbawa Tahun 2023**

No	Tindak Pidana Kejahatan	Laki-laki	Perempuan	Anak-anak	Jumlah
1.	Kejahatan terhadap ketertiban umum	1	-	-	1
2.	Kejahatan Perjudian	9	1	-	10
3.	Kejahatan Terhadap Nyawa / Pembunuhan	8	-	-	8
4.	Penganiayaan	26	2	5	33
5.	Menyebabkan Mati / Luka Karena Alpa	4	-	-	4
6.	Pencurian	98	-	8	106
7.	Pemerasan dan Pengancaman	2	-	-	2
8.	Penggelapan	7	1	-	8
9.	Penipuan	3	1	-	4
10.	Penadahan	5	-	-	5
11.	Tindak Pidana Senjata Api / Tajam	1	-	-	1
12.	Tindak Pidana Narkotika / Psikotropika	82	4	3	89
13.	Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga	2	-	-	2
14.	Tindak Pidana Kesehatan	4	-	-	4
15.	Tindak Pidana Perlindungan Anak	26	-	-	26
16.	Tindak Pidana ITE	1	-	7	8
17.	Tindak Pidana Kehutanan / Illegal Logging	2	-	-	2
18.	Tindak Pidana Lain / LL / Tipiring	6.153	571	236	6.960
<b>Jumlah tindak kriminal selama 1 tahun</b>		<b>6.434</b>	<b>580</b>	<b>259</b>	<b>7.273</b>
<b>Jumlah penduduk Kab. Sumbawa tahun 2023</b>		<b>529.487</b>			
<b>Angka Kriminalitas</b>		<b>121,51</b>			

Sumber Data: Pengadilan Negeri Sumbawa Besar

Kriminalitas adalah perbuatan manusia yang melanggar aturan, norma, bahkan hukum. Beberapa bentuk kriminalitas di antaranya pencurian, perkelahian, pembunuhan, perampokan, tawuran, perang antar kampung, atau kenakalan remaja. Angka kriminalitas adalah jumlah kejahatan yang terjadi

dalam satu tahun dibagi dengan jumlah penduduk, kemudian dikalikan 10.000. Angka ini menunjukkan risiko atau tingkat kerawanan kejahatan di suatu wilayah pada waktu tertentu. Semakin tinggi angka kriminalitas, maka tingkat keamanan di suatu wilayah akan semakin rendah. Angka kriminalitas di Kabupaten Sumbawa pada tahun 2023 mencapai 121,51 menunjukkan bahwa dalam 100.000 penduduk terdapat 121 orang penduduk yang berisiko mengalami tindak kejahatan dalam satu tahun.

Jumlah Aparat Desa dirinci per Kecamatan di Kabupaten Sumbawa tahun 2023

**Tabel 7. 4 Jumlah Aparat Desa Menurut Kecamatan Tahun 2023**

No.	Kecamatan	Desa/ Kelurahan	APD	BPD	RW	RT
1	Lunyuk	7	92	45	45	121
2	Orong Telu	4	49	20	17	42
3	Alas	8	98	56	80	188
4	Alas Barat	8	95	50	62	143
5	Buer	6	66	34	35	86
6	Utan	9	112	61	68	180
7	Rhee	4	48	22	16	40
8	Batulanteh	6	75	32	50	104
9	Sumbawa	8	-	-		
10	Labuhan Badas	7	92	47	78	218
11	Unter Iwes	8	94	46	62	160
12	Moyohilir	10	128	56	56	177
13	Moyo Utara	6	72	32	35	82
14	Moyohulu	12	144	62	78	190
15	Ropang	5	55	25	15	39
16	Lenangguar	4	50	22	28	68
17	Lantung	4	44	20	12	24
18	Lape	4	54	30	48	119
19	Lopok	7	97	43	68	148
20	Plampang	11	133	67	93	239
21	Labangka	5	63	29	43	103
22	Maronge	4	50	22	36	79
23	Empang	10	120	52	59	173
24	Tarano	8	99	42	51	123
Jumlah		<b>165</b>	<b>1.818</b>	<b>1.932</b>	<b>915</b>	<b>2.846</b>

Sumber Data: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Sumbawa